



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA PEROKONOMIAN
MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI
KEMAGANGIRAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
KABUPATEN 50 KOTA DITINJAU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

DESSY LARAS WATI

NIM: 11725200542

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***"PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN SOLOK DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH***. Yang ditulis oleh:

Nama : DESSY LARAS WATI

NIM : 11725200542

Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
NIP. 19730307 200701 1 032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN 50 KOTA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”*, yang ditulis oleh :

Nama : Dessy Laras Wati
 NIM : 11725200542
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin , 26 Juli 2021
 Waktu : 13.00WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra S.Hi M. Si

Penguji I

Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec

Penguji II

Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli. M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dessy Laras Wati (2021) : Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah

Skripsi ini adalah penelitian tentang peranan Bantuan Langsung Tunai tpaada perekonomian masyarakat Nagari Simalanggang. Pokok permasalahan nya adalah bagaimana peranan Bantuan Langsung Tunai terhadap perekonomian mereka selama pandemic Covid-19. Masalah ini di dilihat dan di bahas dengan metode kualitatif.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu, peranan Bantuan Langsung Tunai pada perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di kenagarian simalanggang kecamatan payakumbuh kabupaten 50 kota di tinjau menurut ekonomi syariah

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan, terdapat hasil yaitu Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Nagari simalanggang sudah di lakukan dengan baik oleh pemerintah desa, namun bantuan ini memang tidak secara langsung berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di masa pandemic covid-19, namun program ini membawa manfaat bagi mereka, umumnya manfaat yang diperoleh masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai bersifat jangka pendek, yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli sembako.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Masyarakat Miskin, Covid-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah dan hukum UIN Suska Riau. adapun judul skripsi penulis ialah “**PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN 50 KOTA DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.**”

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya , Rismairizal (Alm) selaku ayah dan Emilia selaku ibu, Nofrianti Putri Utami, S.Sos dan Zainil Darman, S.Ds selaku kakak dan abang ipar, dan Salsha Tri Ananda selaku adik yang sangat saya cintai serta keluarga besar yang memberikan kasih sayang dan dukungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- motivasi hidup yang luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli. M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh selaku ketua program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Jenita,Dr.,SE.,MM selaku Pendamping Akademik dari awal perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh Selaku dosen pembimbing proposal sekaligus skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan yang sangat luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu dan motivasi serta membantu menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak-bapak dan ibuk-ibuk seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan moyivasi kepada penulis.
9. Bapak Ahmad selaku Wali Nagari Simalanggang yang telah mengijinkan saya melakukan penelitian.
10. Bapak Jufri selaku Sekretaris Kaur Pemerintahan yang telah membimbing saya ditempat penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keluarga Besar Ekonomi Syariah, Khususnya Ekonomi Syariah Kelas D angkata 2017 yang telah memberikan saran kepada penulis dalam melakukan penelitian.

12. Kepada teman dekat dari awal masuk kuliah Mia Alfriska Damanik S.E, Anggun Salsabilla S.E , Putri Sausan Imaltin S.E, Sri Jamelati S.E, yang selalu memberikan support dan Motivasi kepada saya sampai saat ini.

13. Kepada teman KKN Nagasuta terkhususnya Delvi Silvia S.P, Rifqatul Umi Adzkia S.Sos, Cica Wahyuni Saputri S.Sos, dan Yuni Monita S.Sos yang selalu memberikan support dan motivasi kepada saya sampai saat ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru 12 Juli 2021

Penulis

DESSY LARAS WATI
NIM :11725200542

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitianb	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Nagari Simalanggang	17
B. Sejarah Nagari Simalanggang	18
C. Sosial-Religius Masyarakat Nagari Simalanggang	19
D. Kondisi Geografis Nagari Simalanggang	20
E. Kondisi Sosial Nagari Simalanggang	20
F. Visi dan Misi Nagari Simalanggang	22
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Simalanggang	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	31
B. Dana Desa	40
C. Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	40
D. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	41
E. Ketahanan Ekonomi Keluarga Kelas Bawah	42
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	49
G. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian.....	54



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota	56
B. Tinjauan Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Perekonomian Masyarakat Miskin yang Terkena Dampak Covid 19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kanupaten 50 Kota Menurut Ekonomi Syariah	68
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Nagari Simalanggang	8
Tabel II.1	Batas Wilayah Nagari	17
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	19
Tabel II.3	Kondisi Geografis	20
Tabel II.4	Penduduk Menurut Mata Pencarian	21
Tabel IV.1	Masyarakat Miskin Nagari Simalanggang	59
Tabel IV.2	Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Nagari Simalanggang	59
Table IV.3	Data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Simalanggang	64
Tabel IV.4	Data Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Nagari Simalanggang	66
Tabel IV.5	Yang Tidak Menerima Bantuan Tetapi Miskin Nagari Simalanggang	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di Negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan. Maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau bisa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin. BLT.¹

Di Indonesia, konsep tentang jaminan sosial diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada Kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kemudian dalam pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa : “Negara

¹Selviana, “Bantuan Langsung Tunai” , *dalam* Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No.2 November 2016, hlm 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.²

Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah di dalam Al-Qur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhalifaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana Firman Allah SWT :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya :“Dan dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat member hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Al-An'am : 165).³

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya berlaku jujur dan tanggung jawab karena merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 :

²Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h.

³Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), h 150.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kami) apabila menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’ : 58)⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, pada tahun 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti pada 2005. Langkah ini di tempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan.⁵

Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan itu diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Sistem Dana Jaminan Sosial dan pada tahun 2003 berubah menjadi Dana Kompensasi BBM, dan tidak langsung, misalnya dana bergilir. Dana jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan. Program ini bertujuan melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat

⁴Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005), h 150.

⁵*Ibid.*, h.517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan sosial maka dari itu diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin.

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi diluar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 122 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.⁶

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya

⁶Covid-19 Coronavirus Pandemic.(n.d.).<https://www.worldometers.info/coronavirus>
Diakses pada Selasa, 25 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas perekonomian domestic, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berperan pada terjadinya kemiskinan antar generasi.⁸

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, Peranan Covid 19 lebih dirasakan oleh masyarakat diperkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid 19 juga bisa merebak didesa. Kegiatan mudik menjelang ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2020 ini juga bisa memperluas penyebaran Covid-19 dipedesaan. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Terbitnya Perppu No.1/2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan Peranan Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/ pemotongan/ penundaan dalam

⁷Carly Erfly Fernando Maun, (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/30702/29514>. Diakses pada Selasa, 25 November 2020.

⁸ *Ibid.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Covid-19.⁹

Anggaran dana desa pada 2020 ditetapkan Rp. 72 triliun. Untuk kebutuhan BLT-D, dilaokasikan 20-30 persen dari total dana desa. Pelaksanaan BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat adalah rumah tangga. Target tersebut relevan ditetapkan mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Sementara/ Bantuan Langsung Tunai.¹⁰

Program Bantuan Langsung Tunai akan disalurkan bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) terdampak Covid-19 dan diserahkan oleh kepala desa serta perangkat desa. Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. *Pertama*, desa yang memiliki anggaran Rp.800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. *Kedua*, desa yang memiliki anggaran Rp.800 juta hingga Rp.1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Dan *ketiga*, adalah desa dengan anggaran di atas Rp.1,2 miliar BLT yang akan dialokasikan 35 persen. Untuk itu, perlu ada revisi APDes dengan merujuk pada Pemendagri Nomor 69 Tahun 2018. Dana desa

⁹Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19, *dalam Jurnal*, Unsrat.ac.id Minahasa Selatan, hlm 3

¹⁰ *Ibid.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan fokus ketiga hal, yaitu penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.

Dalam konteks pandemi Covid-19, BLT diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan Peranan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan mempertimbangkan beragamnya karakteristik warga miskin dan rentan di Indonesia, pemerintah tidak bisa menerapkan satu mekanisme penetapan sasaran dan penyaluran BLT. Besaran BLT yang diberikan sebesar Rp. 600.000 perbulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah Virus Corona (Covid-19).

Penyaluran BLT ini diberikan selama 3 (tiga) bulan dari April hingga Juni. Syarat penerimaannya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Penerima BLT ini didasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penerapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. BLT dianggarkan dalam APBD desa maksimal sebesar 35 persen dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya. Penyaluran dana desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggung jawaban BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran dana desa tahap III. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.¹¹

Desa Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 kota merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di kota-kota besar. Karena pandemi Covid-19 dalam 4 bulan terakhir omset hasil pertanian menurun.¹²

Tabel I.1
Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT
Nagari Simalanggang

No	Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan
1	Emilia	Jorong kotosimalanggang	48 tahun	Ibu rumah tangga (janda)
2	Walina	Jorong kotosimalanggang	65 tahun	Ibu rumah tangga
3	Basir	Jorong kotosimalanggang	73 tahun	Petani
4	Alnaida	Jorong kotosimalanggang	48 tahun	ibu rumah tangga
5	Deli	Jorong Balai rupihsimalanggang	45 tahun	ibu rumah tangga
6	Yati	Jorong balai rupihsimalanggang	35 tahun	Pedagang
7	Yusni	Jorong balai rupihsimalanggang	37 tahun	Pedagang
8	Fikri	Jorong balai rupihsimalanggang	56 tahun	Petani
9	Ranjaya	Jorong Tabiah Ranah	78 tahun	Tidak bekerja
10	Ehilia	Jorong Tabiang Ranah	43	Ibu rumah

¹¹Baso Iping, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)", *dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Issue 2, Juli 2020, h.

¹²Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19, *dalam Jurnal, Unsrat.ac.id Minahasa Selatan*, hlm 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan
		Simalanggang	tahun	tangga (janda)
11	Gadih	Jorong tabing ranah simalanggang	60 tahun	Petani
12	Sugi yem	Jorong tabing ranah simalanggang	30 tahun	Ibu rumah tangga
13	Ida	Jorong api-api simalanggang	60 tahun	Pedagang
14	Bejo	Jorong api-api simalanggang	56 tahun	Sopir
15	Rita	Jorong api-api simalanggang	60 tahun	Ibu rumah tangga

Sumber : Kantor Wali Nagari Simalanggang, 2021

Pada table I.1 diatas dapat dilihat daftar nama nama masyarakat Simalanggang yang menerima bantuan langsung tunai (BLT), Covid-19 secara nyata telah berPeranan terhadap perekonomian di berbagai sektor, yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi maupun sektor keuangan baik swasta maupun Negara.Selain mengancam kesehatan ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu warga.Peranan pemberin BLT dapat meringankan ekonomi rumah tangga dimasa pandemi.¹³

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan bantuan langsung tunai terhadap perekonomian masyarakat miskin yang terkena Dampak covid-19 di kenagarian Simalanggang kecamatan payakumbuh kabupaten 50 kota. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin yang terkena Dampak Covid-19 di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

¹³ *Ibid.*, h.523

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dalam pembahasan skripsi ini. Maka pembatasan hanya di batasi pada Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana Tinjauan peran bantuan langsung tunai pada Perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 di kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota menurut ekonomi syariah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan penelitian antara lain:

1. Kegunaan praktis
 - a. Menambah wawasan peneliti tentang kondisi ekonomi masyarakat desa simalanggang.
 - b. Menambah pengetahuan peneliti tentang Peranan bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin yang terkena Dampak covid-19.
2. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai Bantuan Langsung Tunai.
 - b. Diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan jenis penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 kota.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wali nagari, perangkat desa dan masyarakat Kenagarian Simalanggang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Terkena Peranan Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari subjeknya. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung ke wali nagari dan masyarakat simalanggang.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang peneliti dapatkan dari buku, jurnal, dan wawancara yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu, pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti yaitu wali nagari dan masyarakat simalanggang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Yaitu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

c. Dokumentasi

Yaitu, sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Populasi dapat berupa himpunan orang benda (hidup atau mati), kejadian, kasus, tempat, cirri atau fisik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 orang, yaitu Wali Nagari dan Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai di Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. Adapun masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai sebagai penguat data penelitian.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena jumlah populasinya sedikit, maka penulis tidak menarik sampel, semua populasi diteliti (*Total Sampling*). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang.

¹⁴Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013), cet Ke – 5, h.173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, sebagai pendukung atau penguat data penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa orang masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani, 2010. Dengan judul **“Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.”**

Dari hasil penelitian tersebut, peranan dana bantuan langsung tunai di desa sarik menurut ketentuannya di peroleh masyarakat miskin setiap 3 bulan dalam satu tahun sebesar Rp.300.000 yang disalurkan oleh kantor pos dan aparat desa yang membagikan langsung kepada masyarakat miskin. Namun di lapangan Bantuan Langsung Tunai yang diterima

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat berkurang, hal ini disebabkan factor ekonomi masyarakat kadang-kadang naik dari bulan bulan dan kadang turun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti, 2017. Dengan judul **“Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.”**

Dari hasil penelitian tersebut efektifitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Rimba Melintang kurang efektif dilihat pada data olahan hasil penelitian yaitu sebesar 2,9% untuk pilihan efektif, 53,70% untuk pilihan kurang efektif dan 33,33% untuk pilihan tidak efektif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin, 2020. Dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.”**

Dari hasil penelitian tersebut Selain itu Implementasi Program BLT di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano tidak optimal, karena data yang di pakai tidak di lakukan revisi atau di verifikasi terlebih dahulu. Penyampaian BLT ini dibutuhkan data yang valid siapa dan di mana RTS yang pantas menerima BLT tersebut bertempat tinggal.

G Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa sub BAB yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan yang saling melengkapi berikut garis besar sistematika penulisan penelitian yang dilakukan yaitu:

Bab Satu Pendahuluan, Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Pada Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori ini berisikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Masyarakat Miskin, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab Tiga Metode Penelitian, Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang berkaitan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, riset fokus, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat Hasil Penelitian Dan Pembahasan dan, Dalam Bab ini menurut tentang uraian mengenai Peranan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin yang Terkena Peranan Covid-19.

Bab Lima Penutup, Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan mengemukakan saran-sarandalam usaha menyelesaikan permasalahan yang ada.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Nagari Simalanggang

Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Nagari ini berjarak 5 kilometer dari Kota Payakumbuh, 13 kilometer dari Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 3 kilometer dari Ibukota Kecamatan.¹⁶

Secara administratif, Nagari ini berada di ketinggian 513 meter dari permukaan laut. Wilayahnya berbatasan dengan Nagari Koto Tangah Simalanggang di utara, Nagari Lampasi di selatan, Nagari Koto Baru Simalanggang di barat, serta Nagari Koto Nan Gadang di timur. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Batas Wilayah Nagari

Letak Batas	Nagari	Keterangan
Sebelah Utara	Koto Tangah Simalanggang	Nagari
Sebelah Timur	Koto Nan Gadang	Nagari
Sebelah Selatan	Lampasi	Kelurahan
Sebelah Barat	Koto Baru Simalanggang	Nagari

Sumber : Kantor Wali Nagari Simalanggang, 2021

Nagari Simalanggang terbagi dalam empat jorong yaitu, Jorong Koto, Jorong Tabing Ranah, Jorong Balai Rupih, Jorong Api-api, dengan luas wilayah 3,39 km².¹⁷

¹⁶ Kantor Wali Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, 2021

¹⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Nagari Simalanggang

Nama Simalanggang berasal dari Sumue Onggang artinya dahulunya burung onggang jatuh malang melewati sumue yang berada di Koto Kocik karena disumpahi hingga sampai saat ini dan pada waktu itu Koto Kociak di pagari dengan pudiang sehingga bernama Koto Pudiang.

Simalanggang Baa Pucuk Bulek, Baa Urek Tanggang,...

“Bagola Tuanku Daulat Engku Bandaro Pucuk”

Simalanggang terdiri onam koto dilua yaitu, Taeh dan simalanggang, piobang dan sungai beringin, gurun dan lubuk batingkok, sepuluh koto didalam yaitu, tigo di baruah, tigo di sudud, dan tigo diateh, sepuluh dengan koto pudiang. Mulai tahun 1898 sampai dengan tahun 1923 simalanggang menjadi sepuluhkenagarian .

Sehubungan dengan jalannya roda pemerintahan dari masa penjajahan Belanda ke Masa penjajahan Jepang ke Masa Pemerintahan Darurat (PDRI) ke Masa Reformasi (saat sekarang ini) yang sangat mempengaruhi Adat, Budaya, Syarak dan Otoritas Adat atau pemerintahan Adat adalah pemecahan Daerah Otoritas Pemerintahan Adat yaitu, Enam Koto diluar Gurun dan Lubuk Batingkok sekarang menjadi di wilayah kecamatan Harau. Tiga Dibuah (Kanagarian Lampasi) sejak 17 Desember 1970 menjadi bagian Kota Payakumbuh.¹⁸

¹⁸ <http://simalanggang.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021 ,pukul 18.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Sosial-Religius Masyarakat Nagari Simalanggang

1. Penduduk

Jumlah Penduduk Nagari Simalanggang terdiri dari 5 (lima) jorong, dengan jumlah penduduk menurut golongan umur jumlah penduduk = 4.906 laki-laki = 2.520 perempuan = 2.386. Umur bayi dari 2-4 tahun = 1, 5-9 tahun = 266, 10-14 tahun = 460, 15-19 tahun = 451, 20-24 tahun = 471, 25-29 tahun = 406, 30-34 tahun = 407, 35-39 tahun = 411, 40-44 tahun = 415, 45-49 tahun = 322, 50-54 tahun = 266, 55-59 tahun = 231, 60-64 tahun = 236, 65-69 tahun = 212, 70-74 tahun = 96, di atas 75 tahun = 255. Jumlah penduduk 4.906 jiwa dengan perincian laki-laki = 2.520 perempuan = 2.386. Penjelasan di atas di rincikan lebih jelas dalam table.¹⁹

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah
1	2-4 tahun	1
2	5-9 tahun	266
3	10-14 tahun	460
4	15-19 tahun	451
5	20-24 tahun	471
6	25-29 tahun	406
7	30-34 tahun	407
8	35-39 tahun	411
9	40-44 tahun	415
10	45-49 tahun	322
11	50-54 tahun	266
12	55-59 tahun	231
13	60-64 tahun	236
14	65-69 tahun	212
15	70-74 tahun	96
16	Di atas 75 tahun	255
	Total	4906

Sumber : Kantor Wali Nagari Simalanggang, 2021

¹⁹ Op.cit. h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keagamaan

Agama merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak dan kepribadian seseorang, untuk itu Negara Republik Indonesia (RI) mewajibkan setiap mewajibkan setiap warga negaranya memeluk satu agama dan mengamalkannya, seperti Nagari Simalanggang semua penduduknya Islam. Sarana ibadah di Nagari Simalanggang sudah cukup nyaman. Total mesjid di Nagari Simalanggang adalah 4 mesjid dan 6 Musholla.²⁰

D. Kondisi Geografis Nagari Simalanggang

Ketinggian wilayah Nagari Simalanggang dari permukaan Laut masuk pada katagori ketinggian 0-599,9m, sedangkan curah hujan berkisaran antara 200-250mm dengan keadaan suhu rata-rata antara 25-30°C.²¹

Tabel II.3
Kondisi Geografis

No	Kondisi Grafis	Keterangan
1.	Tinggi Tempat Dari Permukaan laut	0-599,9 m
2.	Curah Hujan Rata-Rata Pertahun	200-250 mm
3.	Keadaan Suhu Rata-Rata	25-30°C

Sumber : Kantor Wali Nagari Simalanggang, 2021

E. Kondisi Sosial Kelurahan Nagari Simalanggang

1. Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang dibagi kedalam tamat SD 1078 orang, tamat SLTP 708 orang, tamat

²⁰ Wawancara dengan Pak Ahmad Selaku Wali Nagari Simalanggang

²¹ Dokumentasi, Papan Monografi Nagari Simalanggang 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SLTA 865 orang, DIPLOMA I/II 32 orang, DIPLOMA II 49 orang, STRATA I 163 orang, STRATA II 5 orang.²²

2. Struktur Mata Pencaharian

Berdasarkan dari sumber data mata pencaharian masyarakat Nagari Simalanggang terbagi ke dalam: mengurus rumah tangga, pelajara atau mahasiswa, pensiunan, pegawai negeri sipil (PNS), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian RI (POLRI), perdagangan, peternak, kontruksi, karyawan swasta, karyawan BUMN , karyawan honorer, buruh harian lepas, buruh tani/perkebunan, buruh peternakan, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang listrik, tukang kayu, tukang jahit, piñata rias, mekanik, seniman, anggota DPRD kabupaten/kota, guru, dokter, perawat, sopir pedagang, perangkat desa, kepala desa, wiraswasta. Untuk lebih jelasnya lagi lihat pada table berikut.

Tabel II.4
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Mengurusrumahtangga	1.067
2	Pelajar/mahasiswa	1.106
3	Pensiunan	41
4	PegawaiNegeriSipil (PNS)	79
5	TentaraNasional Indonesia (TNI)	2
6	Kepolisian RI (POLRI)	9
7	Perdagangan	22
8	Petani/pekebun	537
9	Peternak	12
10	Konstruksi	1
11	KaryawanSwasta	70
12	Karyawan BUMN	5
13	Karyawan BUMD	2
14	Karyawanhonorer	20

²² Website Nagari Simalanggang, *Data Demografi Dasar Pendidikan dalam KK* (Simalanggang 15 Maret 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mata Pencanharian	Jumlah (orang)
15	Buruhharianlepas	110
16	Buruhtani/pekebunan	5
17	Buruhpeternakan	4
18	Pembanturumahtangga	4
19	Tukangcukur	3
20	Tukanglistrik	2
21	Tukangbatu	20
22	Tukangkayu	32
23	Tukangjahit	39
24	Penatarias	1
25	Mekanik	3
26	Seniman	1
27	Anggota DPRD	1
28	Guru	28
29	Dokter	2
30	Perawat	3
31	Sopir	41
32	Pedagang	96
33	Perangkatdesa	4
34	Kepaladesa	2
35	Wiraswasta	431
	Total	3.805

Sumber :Kantor Wali Nagari Simalanggang, 2021

State Visi dan Misi Nagari Simalanggang

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat desa senggigi yang Bersih, Religius, Sejahtera, Rapid an indah melalui Akselerasi Pembangunan yang berbasis Keagamaan, Budaya Hukum dan Berwawasan Lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan Kinerja Aparatur dan pemberdayaan Masyarakat.”

b. Misi

Dan untuk melaksanakan visi nagari Simalanggang dilaksanakan misi program sebagai berikut:

1. Pembangunan jangka panjang

- a. Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah nagari dengan lembaga nagari yang ada
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana prasarana ekonomi warga
2. Pembangunan jangka pendek
 - a. Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang mengikat di Nagari Simalanggang
 - b. Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan sarana ekonomi
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia.²³

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Simalanggang

Struktur pemerintahan Nagari Simalanggang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Nagari Simalanggang dengan pola minimal selengkapnyanya di sajikan dengan gambar berikut:

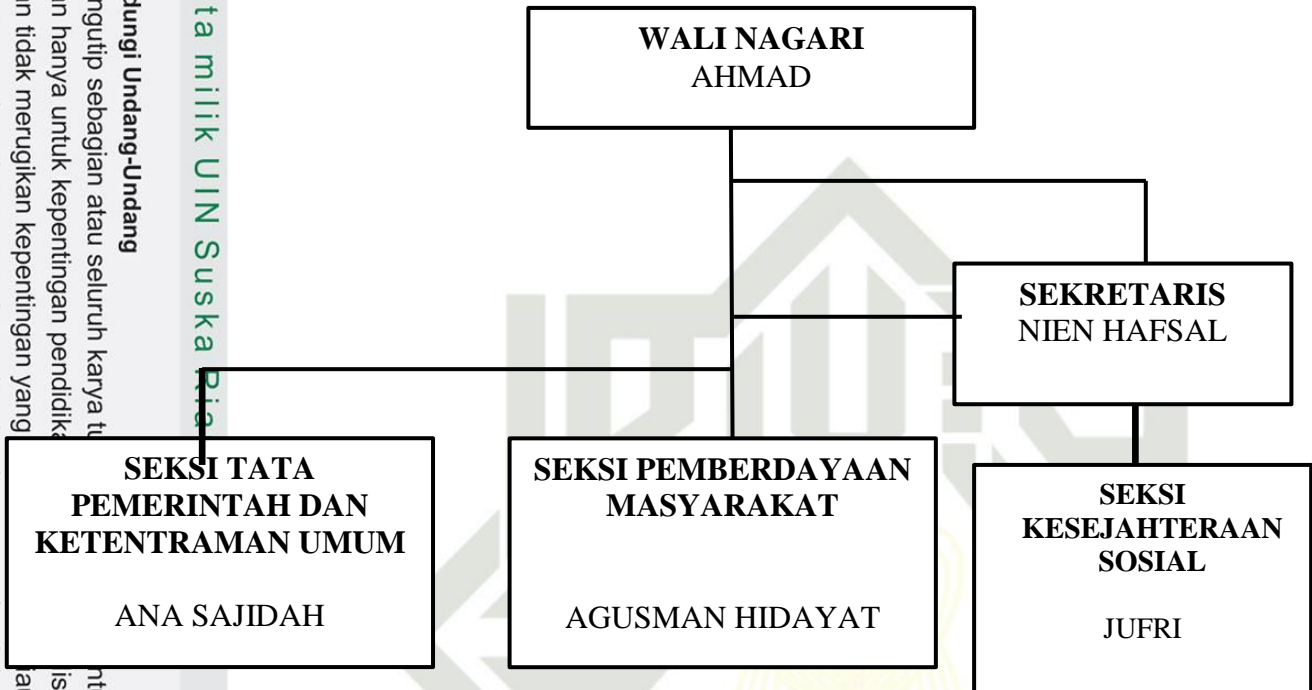
²³ Wawancara dengan Bapak Jufri Selaku Sekretaris Nagari Simalanggang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Simalannggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota



a. Tugas dan Fungsi Wali Nagari Simalannggang

Wali Nagari Simalannggang berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Nagari yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Wali nagari sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Nagari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.²⁴ Untuk melaksanakan tugasnya wali nagari mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Nagari

²⁴<https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id> (diakses pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 09.32)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Nagari
- 6) Membina ekonomi Nagari
- 7) Mengkoordinasi pembangunan Nagari secara partisipatif
- 8) Mewakili Nagarnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁵

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Nagari

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi yaitu:

- a) Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Nagari
- c) Melakukan urusan ketatausahaan seperti naskah administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- d) Melakukan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

- e) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Nagari lainnya
- f) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.²⁶

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (KAUR) Umum Perencanaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala urusan (KAUR) umum dan perencanaan yaitu:

- 1) Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan
- 2) Tata naskah
- 3) Administrasi surat menyurat
- 4) Arsip
- 5) Ekspedisi

²⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penataan administrasi perangkat nagari
- 7) Penyediaan prasarana perangkat dan kantor
- 8) Penyiapan rapat
- 9) Pengadministrasian asset
- 10) Inventaris
- 11) Perjalanan dinas
- 12) Pelayanan umum
- 13) Menyusun apb nagari
- 14) Inventaris data-data pembangunan
- 15) Monitoring dan evaluasi program
- 16) Penyusunan laporan

d. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kaur keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan nagari, pengelolaan administrasi keuangan nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB nagari
- 2) Administrasi keuangan
- 3) Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
- 4) Verifikasi administrasi keuangan
- 5) Administrasi penghasilan wali nagari, perangkat nagari, bamus, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya²⁷

²⁷ Ibid

e. Tugas dan Fungsi Kaur Pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kaur pemerintahan mempunyai

fungsi:

- 1) Membantu wali nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum nagari
- 2) Tatapraja pemerintahan
- 3) Menyusun rencana regulasi nagari
- 4) Pembinaan masalah pertahanan
- 5) Pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban
- 6) Upaya perlindungan rakyat
- 7) Kependudukan
- 8) Penataan pengelolaan wilayah
- 9) Pendataan dan pengelolaan profil nagari
- 10) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana nagari
- 11) Pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan
- 12) Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- 13) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Pelestarian nasional budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan²⁸

f. Tugas dan Fungsi Kepala Jorong (KAJOR)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala jorong mempunyai fungsi

yaitu :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas wali nagari di dalam wilayah kerjanya
- 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- 4) Membantu wali nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasi kegiatan di wilayah kerjanya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali nagari
- 6) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah nagari, pelaksanaan oembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- 7) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 8) Melakukan usaha dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban msyarakat
- 9) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh wali nagari.²⁹

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Bamus Nagari (BADAN MUSYAWARAH NAGARI)

Bamus mempunyai fungsi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- 1) Membahas rancangan peraturan nagari bersama wali nagari
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan nagari dan peraturan wali nagari
- 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari
- 4) Membentuk panitia pemelihan wali nagari
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) Menyusun tata tertib BPD.³⁰

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada Bulan Oktober 2005, pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan Negara, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat makro agar sasaran program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

Penyediaan data kemiskinan mikro walaupun telah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi cakupan, waktu pelaksanaan dan kriteria yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan antar daerah hasilnya bervariasi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan pendataan Sosial Ekonomi Penduduk di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dengan tujuan memperoleh informasi tentang siapa dan dimana penduduk/keluarga miskin.³¹

Ketimpangan pendistribusian pendapatan lebih terasa lagi ketika Megara sedang dilanda berbagai krisis, terutama sekali krisis moneter atau ekonomi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini telah pula menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara drastis. Terutama sekali rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan masalah baru yakni terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.³²

Misi perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat kecil dan untuk lebih menjamin keberadaan hak-hak mereka terus diagung-agungkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan masyarakat miskin harus selalu diprioritaskan. Oleh karena itulah dalam upaya mengurangi beban mereka yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin, maka

³¹http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung
(Badan Periksa Keuangan)

³²Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996), cet-1, h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan program bantuan pemerintah untuk rakyat yang terkena imbas akibat perubahan sosial politik Negara.

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemic Covid-

19. Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Bantuan Langsung Tunai merupakan program kompensasi jangka pendek yang dimaksud dalam tingkah konsumsi Rumah Tangga Sasaran. Dan Rumah Tangga termasuk sangat miskin, miskin dan dekat dengan miskin (*near poor*), tidak kemungkinan pada saat terjadinya Covid-19 dapat terjadi kemiskinan dalam negeri. Dengan ini walaupun program Bantuan Langsung Tunai bukan suatu program yang berkenan dalam pemecahan masalah kemiskinan, diharapkan bisa mendorong untuk penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru.

Bantuan Langsung Tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, Bantuan Langsung Tunai dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp.600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Dasar Hukum Pemerintah desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesiapan pemerintah desa untuk mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa, dimana di tentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Penduduk miskin di desa, diperlukan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya Covid-19.³³

3. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai

Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin mengakibatkan sulitnya ekonomi dan juga tingkat tanggung jawab sosial bersama. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai merupakan bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun keinginan pemerintah harus diringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja.

Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'ad 13:11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.³⁴

³³ Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, diakses melalui TNP2K, di akses pada Tanggal 25 April 2021 Pukul 15:00 h. 2

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra 2002), h..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak ini juga dilanjutkan dengan kebijakan lain, seperti pemberdayaan melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) meliputi:

- a. Dalam bidang pendidikan, bisa menyukseskan program, wajib belajar 9 tahun melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (KBM)
- b. Dalam bidang kesehatan, diarahkan bisa tingkatan pelayanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, yang meliputi layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan rujukan dan pelayanan penunjang lainnya. Bidang infrastruktur di desa tertinggal (jalan, jembatan, air bersih, jamban, perahu, irigasi desa sederhana dan penyediaan listrik bagi daerah yang betul-betul memerlukan).

4. Organisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai merupakan Departemen Sosial selaku kuasa penggunaan Anggaran membantu oleh pihak-pihak terikat pada yang telah ditentukan Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan program. Bantuan Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Rumah Tangga Sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu bentuk kinerja sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, pada lembaga bertanggung jawab kepada kelancaran bidang tugas masing-masing. Dalam kerja sama ini dimaksudkan dalam lajunya proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sasaran kelompok sasaran sehingga pemakaiannya menjadi lebih maksimal.

Pada tingkat sinergi pelayanan yang optimal dan masing-masing lembaga saling berinformasi dan dalam program Bantuan Langsung Tunai difasilitasi penyediaan Unit Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai.

Tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap lembaga bisa dilihat dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran yang bisa dilihat sebagai berikut:

a. Departemen Sosial

Departemen sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan Surat Perintah kepala Pos Indonesia untuk dibayar dana Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu kerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut sesuai dengan daftar nominative penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disampaikan oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, Departemen Sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersama Bappenas, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT. Pos Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero) Tbk. Dimana tanggung jawab pada pemerintah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Sosial wajib dibuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam pelaksanaan jalannya dana Bantuan Langsung Tunai kepada presiden RI.

b. Kewajiban PT Pos Indonesia (persero)

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam program Bantuan Langsung Tunai ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah menyimpan rekening Giro Utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan anggaran dari Departemen sosial yang bisa disalurkan pada rekening giro. Kantor pos dicetak dan menyalurkan Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke KRPK (Kantor Pos Pemerintah) seluruh Indonesia berdasarkan daftar nominative, kemudian KRPK menyalurkan Kartu Kompensasi BBM. Dalam hal ini PT. Pos Indonesia juga bisa melaporkan realisasi jalannya KKB Kepada Departemen Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal Bantuan Langsung Tunai. PT. Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan dana administrasi pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukaan giro.

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah tangga sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan rumah tangga sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk itu disediakan data terakhir (*up dating*) di lapangan, BPS bisa memiliki kewajiban dalam membuat laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

e. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi

Pada tatanan dinas/Instansi sosial Provinsi dalam proses program Bantuan Langsung Tunai tersebut wajib mengontrol unit pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai pada tingkat Provinsi dan struktur pelaksanaannya, ketua pengelola Unit Pelaksana Program (UPP) Bantuan Langsung Tunai merupakan kepala dinas sosial, untuk bertugas dalam insentif selama pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Juga bisa mengkoordinasikan dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk pelaksanaan disamping terhadap kantor pos pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai dengan dilibatkan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

f. Kewajiban Dinas/Instansi Kabupaten Kota

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga sosial Kabupaten/Kota, pada proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai.

g. Kewajiban Desa/Kelurahan

Di pantau petugas pos pada cairannya atau penerima Bantuan Langsung Tunai dan pendistribusian kartu pada Rumah Tangga Sasaran. Bersama-sama dengan petugas pos ditentukan yang mengganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RTS yang pindah/tinggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, melalui musyawarah desa/kelurahan yang dihadiri kepala desa.³⁵

B Dana Desa

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas bahwa dana desa berasal dari APBN yang di transfer melalui APBK dan di peruntukan bagi desa. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.³⁶

C Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria

³⁵ Bambang Widiyanto, *perkembangan Perekonomian, Subsidi BBM dan Evaluasi dan Program BLT*, Surabaya: 2008, h. 78

³⁶ Hasyim Adnan, —Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal asadl*. Volume VII No. 2, Mei-Agustus 2016, h. 13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan di berikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.³⁷

Calon penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)/ pemilik Kartu Kerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan).³⁸

D. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima tersebut tidak tersedia, maka desa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penetapan hasil pendataannya:

³⁷ Rudy S. Prawiradinata, *Op.Cit*, h. 6

³⁸ *Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Proses pendataan
 - a. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
 - b. Melakukan pendataan tingkat Jorong atau Rukun Tetangga (RT) dengan menggunakan formulir pendataan di tingkat dusun.
2. Proses konsolidasi dan Verifikasi
 - a. Petugas pendata menghimpun data dari Jorong atau Rukun Tetangga (RT) dan melakukan verifikasi.
 - b. Petugas pendata memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
 - c. Hasil verifikasi dan pendatan baru di sampaikan kepada kepala desa.³⁹

Ketahanan Ekonomi Keluarga Kelas Bawah

1. Ketahanan Keluarga

Keluarga sebagai sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan integritas dan solidaritas serta pola keseimbangan atau pemeliharaan keluarga.⁴⁰ Keluarga merupakan tempat sosialisasi untuk bekerja, dimana anggota keluarga mempelajari sikap-sikap yang diperlukan dan memasuki pekerjaan yang layak yang memungkinkan keluarga hidup mandiri secara

³⁹*Ibid.*, h. 8-12

⁴⁰Euis Sunarti, Fungsi dan Peran Keluarga, 2001, dalam Disertasi: Institut Pertanian Bogor, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis. Keluarga harmonis dan sejahtera merupakan kondisi yang diidamkan semua keluarga. Keluarga sejahtera dan harmonis diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah., mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.⁴¹

Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan serta kemampuan keluarga untuk memenuhi perekonomian anggota keluarganya. Ketahanan keluarga tersebut mengacu kepada ketahanan pangan, kecukupan dan keseimbangan akses terhadap pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (seperti pendidikan, perumahan, dan kebutuhan ekonomi).

2. Ketahanan Masyarakat Miskin

Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini maka dengan sendirinya masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang lemah, bahkan bisa dikatakan masih kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Biasanya masyarakat miskin memiliki orang-orang yang dekat dalam hidupnya, saling menyayangi dan hidup senang dan susah bersama. Fokus hidup mereka adalah untuk orang yang ada disekitarnya dan sangat mengerti

⁴¹ Ibid, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan paham akan perihal agama. Jika memperoleh uang mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, itupun belum tentu cukup untuk mereka.⁴²

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik secara pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Cara masyarakat kelas bawah untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini adalah dengan cara bekerja semaksimal mungkin, berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

3. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada luasnya didefinisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh orang. Kemiskinan yaitu suatu kondisi yang ada di bawah nilai rendah kebutuhan minimum, baik untuk

⁴²Hanni, perbedaan Mendasar Orang kelas Bawah, Kelas Menengah dan Kelas Atas, <http://berbagiadikaya.blogspot.com/2015/11/perbedaan-mendasar-orang-kelas-bawah.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 15.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan lainnya, bisa disebut dalam garis kemiskinan (*poverty Line*) atau batas kemiskinan (*Poverty Threshold*).⁴³

Kemiskinan yaitu yang dimana terjadi kekurangan hal-hal yang tidak bisa dipunyai orang, seperti makanan, pakaian, rumah, air minum dan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan untuk hidup. Kemiskinan bisa berarti tidak akses pada pendidikan atau kerja yang bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kehormatan yang layak bagi masyarakat, sekaligus juga memutuskan akses terhadap terpenuh hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, peluang kerja, rumah, air bersih, manfaat sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, perlindungan atas tanah, rasa nyaman, serta kesempatan masyarakat bisa berpartisipasi untuk program pembangunan. Demikian juga pemenuhan hak penduduk bermaksud erat kaitannya pada pengembangan suatu wilayah, dalam cepatnya pembangunan pedesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, mengembangkan kawasan pesisir serta lajunya pembangunan daerah tertinggal.⁴⁴

Ada tiga tipe orang miskin pada pendapatan yang dibutuh setiap orang dalam setiap tahun, yaitu :

1. Miskin, orang miskin yang berpenghasilan kecil didalam bentuk beras yaitu 315kg/orang/tahun.

⁴³ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika :2008,

⁴⁴ Person, *Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sangat miskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalah 250kg/orang/tahun.
3. Termiskin, bisa dikatakan sangat miskin yaitu orang yang berpenghasilan jika diwujudkan bentuk beras adalag 190kg/orang/tahun.⁴⁵

4. Ciri-Ciri Keluarga Miskin

Keluarga lazimnya digambarkan sebagai gejala kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada dibawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

- 1) Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
- 2) Posisi manusia dilingkungan sekitar.
- 3) Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi.

Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang dimiliki. Posisi manusia dalam lingkungan sosial bukan kebutuhan pokok yang menentukan, melainkan bagaimana posisi pendapatannya di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup

⁴⁵ Ibid, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusiawi ditentukan oleh komposisi pangan apakah bergizi cukup dengan protein dan kalori, sesuai dengan tingkat umur, jenis kelamin, sifat pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan alam yang dialaminya.

Ciri-ciri masyarakat atau keluarga yang berada dalam golongan masyarakat ekonomi kelas bawah atau kemiskinan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan minuman dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan) tidak terpenuhi
- b. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan
- c. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas (*self employed*), berusaha apa saja
- d. Banyak yang hidup di kota berusia muda, dan tidak mempunyai keterampilan⁴⁶

Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara :

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

⁴⁶ Wibawa Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.⁴⁷

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki factor produksi sendiri.
2. Tidak mempunyai besar untuk memperoleh asset produksi pada kekuatan itu sendiri.
3. Tingkat pendidikannya masih rendah/kurang.
4. Banyak diantara merka yang tidak mempunyai fasilitas.
5. Di antara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.
6. Makan dua atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).
7. Tidak ada biaya berobat karena sakit.
8. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau di pimpin kepala keluarga perempuan.⁴⁸

Adapun yang menjadi penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Kemiskinan karena kolonialisme, kemiskinan itu terjadi pada penjajahan yang di lakukakan oleh suatu Negara lain, sehingga Negara yang dijajah menjadi tertindas, baik di bidang ekonomi, politik dan sebagainya.

⁴⁷ Nofrianti Putri Utami. Strategi Masyarakat Miskin Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga. *Skripsi*. lain bukittinggi. 2019

⁴⁸ Wibawa Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural, karena ini terkait dengan suku bangsa tertentu yang kental kebudayaannya, seperti suku kubu sumatera, suku dayak di pedalaman Kalimantan.
3. Miskin karena terisolir, orang menjadi miskin karena tempat tinggalnya jauh dari kota sehingga sulit berkembang.
4. Miskin structural atau tatanan kehidupan yang menguntungkan. Kemiskinan ini disebabkan juga oleh persaingan yang tidak seimbang antar Negara atau daerah yang mempunyai keunggulan komparatif.⁴⁹

F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bernyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰ Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.⁵¹

Pemberdayaan dalam Bahasa Arab yaitu *tamkin*, kata *tamkin* ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki

⁴⁹ *Ibid*, h. 29

⁵⁰ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

⁵¹ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan), atau bersifat *ma'nawi*. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan meraih kekuasaan ditangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum mempunya kepada kaum yang tidak mempunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola lembaga masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.⁵²

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

⁵² Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke 3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat di lepaskan dari kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat di tinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada dua kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan secara ekonomi, dalam hal kemiskinan dapat di lihat dengan indicator minimnya pendapat masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Kemiskinan yang di pengaruhi tingkah laku dan sikap mental. Berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros dan malas.

Sikap di atas mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan pada dirinya sendiri. Dapat di simpulkan adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi makro sehingga pemerataan pembangunan dari konsep keadilan sosial tidak mengenai sasaran.

Ada dua hal mendasar yang di perlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan ruh jiwa Islam itu sendiri.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep Islam.⁵³

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan beternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran yang sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di milikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa

⁵³ Muhammad Ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 Juni 2009

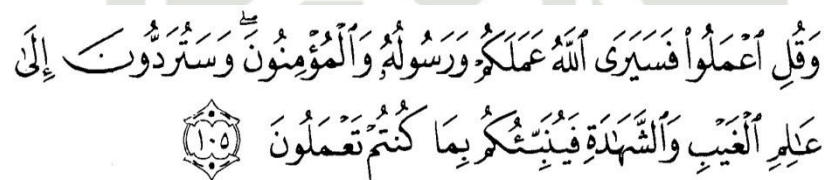
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam Islam bersifat menyeluruh menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.⁵⁴

3. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terkait dengan pemberdayaan, dasar hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat terkandung dalam firman QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT :



Artinya: dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan anca,an dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada Rasullullah dan kaum mu'minin.

Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugerah berupa sumber penghidupan

⁵⁴ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Cet Ke 3, h.215

dan al'hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap bertawaqal dan bersyukur kepada Allah SWT.⁵⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau G Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian

Ada banyak kerugian di sebabkan oleh covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia pembangunan ekonomi sebuah Negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Pada kasus Indonesia merupakan kombinasi dua unsure yang terjadi secara bersamaan, dimana unsure eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun rill. Kedua factor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul, perekonomian nasional yang sangat lemah sangat mudah terkena dampak negative sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh Negara kita.

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang tutup untuk mengurangi penyebaran virus corona. Akibat nya pedagang ini tidak mempunyai penghasilan tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Covid-19 memberikan dampak yang buruk bagi

⁵⁵ Sulistiyani A.T, *kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010) h. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian masyarakat Indonesia tidak terkecuali perekonomian masyarakat desa.⁵⁶

Covid-19 yang terus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi permintaan agregat.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang terkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa.⁵⁷

⁵⁶ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Of Education Psychology and Counseling*, Volume 2 Nomor 1, 2020, h.150

⁵⁷ Liviana PH, "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Indonesian Journal Of Nursing and Health Sciences*, Vol 1 Nomor 1, 2020, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Masyarakat secara bijak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemic Covid-19. Dari hasil penelitian pada msyarakat Desa Simalanggang yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total 15 orang. Kondisi perekonomian masyarakat yang melemah karena dampak dari pandemic Covid-19 program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meringankan beban perekonomian, walaupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, susu, obat-obatan, membayar tagihan listrik.

B. Saran

1) Bagi Pemerintah Desa

Untuk kedepan nya pemerintah desa memang harus lebih memaksimalkan sisi transparansi (keterbukaan) mengenai mekanisme dan penjangkaran dalam menetapkan petugas di lapangan harus lebih luas agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan yang berpotensi untuk mengikis pemerataan dan keadilan.

2) Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu untuk lebih bijak dalam memanfaatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka, atau dengan kata lain adalah bukan hanya sebatas pada perilaku konsumtif semata.

- b. Kesadaran dan rasa inisiatif yang besar memang dibutuhkan untuk mampu menyampaikan keluhan kesah kepada pihak yang berwenang, sehingga datangnya solusi di kemudian hari bukan suatu hal yang mustahil. Dalam persoalan Bantuan Langsung Tunai yang mungkin masih banyak ditemukan tidak tepat sasaran, maka sebagai masyarakat tentunya harus menyadari tentang hak untuk bersuara demi terwujudnya pemerataan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Surjadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Percetakan Almuni, 1969)
- Amad Shalabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*. Cet. 1, tt, Amzah: 2001
- Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bambang Widianto, *perkembangan Perekonomian, Subsidi BBM dan Evaluasidan Program BLT*, Surabaya: 2008
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005)
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra 2002)
- Dis Sunarti, *Fungsi dan Peran Keluarga* , 2001, dalam Disertasi: Institut Pertanian Bogor
- Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996)
- Muhammad Ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 Juni 2009
- Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) Cet Ke 3
- Nofrianti Putri Utami. *Strategi Masyarakat Miskin Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga*.Skripsi.Iain bukittinggi.2019
- Os M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Person, *Publik Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013)

Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung Refika :2008

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sulistiyani A.T, *kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010)

Syeikh Muhammad Baqir As-Sadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)

Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke 3* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Wibawa Samudra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009)
Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)

JURNAL-JURNAL

Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, *dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Issue 2, Juli 2020

Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)”, *dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 1, Issue 2, Juli 2020

Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19, *dalam Jurnal*, Unsrat.ac.id Minahasa Selatan

Hasyim Adnan, —Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal al adl.* Volume VII No. 2, Mei-Agustus 2016

Lyiana PH, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, *dalam Jurnal Indonesian Journal Of Nursing and Health Sciences*, Vol 1 Nomor 1, 2020

Rogina Wowiling, Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19, (Minahasa Selatan: Unsrat)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Silviana, "Bantuan Langsung Tunai" , *dalam* Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No.2 November 2016

Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *dalam* Jurnal Of Education Psychology and Counseling, Volume 2 Nomor 1, 2020

Wiwit, Tri Sulistyaningsih, "*Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*", *dalam* Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 13, Nomor 1, Januari 2020

WEBSITE/SITUS

Baso, Iping. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Bantuan Langsung Tunai. <https://dinastirev.org/JMPIS> Diakses pada Selasa, 25 November 2020.

Carly Erfly Fernando Maun, (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Peranan Covid-19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/30702/29514>. Diakses pada Selasa, 25 November 2020.

Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, diakses melalui TNP2K, di akses pada Tanggal 25 April 2021

Covid-19 Coronavirus Pandemic.(n.d.).<https://www.worldometers.info/coronavirus> Diakses pada Selasa, 25 November 2020

Dokumentasi, Papan Monografi Nagari Simalanggang 2017 Website Nagari Simalanggang, *Data Demografi Dasar Pendidikan dalam KK* (Simalanggang 15 Maret 2019)

Hanni, perbedaan Mendasar Orang kelas Bawah, Kelas Menengah dan Kelas Atas, <http://berbagiadikaya.blogspot.com/2015/11/perbedaan-mendasar-orang-kelas-bawah.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 15.00

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%20II.pdf;jsessionid=892D5CF5A85999741266DED510181337?sequence=3>. (Di akses pada 05 Juli 2021)

<http://simalanggang.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021 ,pukul 18.41

[http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung_\(Badan_Periksa_Keuangan\)](http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung_(Badan_Periksa_Keuangan))

<https://www.tanjungharosikabukabupadanganpanjang.desa.id> (diakses pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 09.32)

Kantor Wali Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Basir pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Bapak Jufri Selaku Sekretaris Nagari Simalanggang

Wawancara dengan Fikri pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Fikri pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibu Alnaida pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibu Deli pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan ibu Ranjaya pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibuk Emilia pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibuk Emilia pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibuk Walina pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibuk Yati pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ibuk Yusni pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Ida pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang

Wawancara dengan Pak Ahmad Selaku Wali Nagari Simalanggang

Wawancara dengan Pak Jufri Kaur Pembangunan pada tanggal 10 Maret 2021 di Desa Simalanggang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Menerangkan bahwa :

Nama :

Nim :

Jurusan :

Fakultas :

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir.

Simalanggang, 10 Maret 2021

Pewawancara

Informan

()

()

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dessy Laras Wati
NIM : 11725200542
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Peranan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Perokonomian Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 Di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Pembimbing : Dr. Syahpawi, S.Ag.M.Sh

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

A. Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Aji Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198304302019031010

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari pengelola jurnal Hukum Islam.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN 50 KOTA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”*, yang ditulis oleh :

Nama : Dessy Laras Wati
NIM : 11725200542
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin , 26 Juli 2021
Waktu : 13.00WIB
Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra S.Hi M. Si

Penguji I

Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec

Penguji II

Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3028/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal: **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 19 Maret 2021

Kepada
Yth. Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : DESSY LARAS WATI
NIM : 11725200542
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peranan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 (studi kasus kenagarian simalanggang kecamatan payakumbuh kabupaten 50 kota"

Demikian disampaikan, terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan I
Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/1087/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 14 Januari 2021

Kepada
Yth.
Kantor Wali Nagari Simalanggang
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : DESSY LARAS WATI
NIM : 11725200542
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2021
Program Studi : Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. Dengan judul, DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 (Studi Kasus di Kenagarian Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota).

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2887/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DESSY LARAS WATI
NIM : 11725200542
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor wali nagari simalanggang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 (studi kasus di kenagarian simalanggang kecamatan payakumbuh kabupaten 50 kota)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 / 638 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2021

Rekomendasi Penelitian

Menimbang	:	a.	Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
		b.	Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
Memperhatikan	:		Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/Pp.00.9/2887/2021 Tanggal 2021 Maret 10 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	:	Dessy Laras Wati
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tabek Panjang
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Koto
Nomor Kartu Identitas	:	1307034412980001
Judul Penelitian	:	Peranan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Terkena Dampak Covid-19 (Studi Kasus Kanagarian Simalangang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota)
Lokasi Penelitian	:	Simalangang
Jadwal Penelitian	:	Maret 2021 s.d Agustus 2021
Penanggung Jawab	:	Dessy Laras Wati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 April 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

JU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40331
T E N T A N G



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2887/2021 Tanggal 10 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

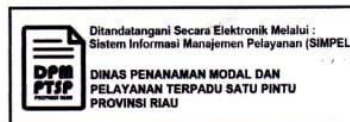
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DESSY LARAS WATI |
| 2. NIM / KTP | : | 11725200542 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI KENAGARIAN SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN 50 KOTA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR WALI NAGARI SIMALANGGANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dessy Laras Wati, lahir pada tanggal 04 Desember 1998 di Tabek Panjang. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Rismairizal (Alm) dan Ibu Emilia.

Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Simalanggang tamat tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh tamat tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muchtar Islamic School dan tamat 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2017-2021.

Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, dan pengalaman Profesi Kerja Lapangan (PKL) di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. Allhamdulillah pada tahun 2021 penulis dapat menyelesaikan Strata-1 (1) pada Program Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berhak meyakini gelar Sarjana Ekonomi S.E.

Amin yaa rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.